

OMBUDSMAN

Adang Daradjatun Minta Kejelasan Penindaklanjutan Rekomendasi PPATK oleh Aparat Penegak Hukum

Updates. - [OMBUDSMAN.CO.ID](https://ombudsman.co.id)

Sep 13, 2022 - 19:53



Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun

JAKARTA - Anggota Komisi III [DPR RI](https://dpr.go.id) Adang Daradjatun meminta kejelasan sejauh apa rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ([PPATK](https://ppatk.go.id)) ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Sebab, menurutnya,

rekomendasi [PPATK](#) berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terorisme, maupun tindak pidana lainnya.

"Saya ingin mendengarkan secara fair dan terbuka sampai sejauh mana rekomendasi itu ditindaklanjuti. Kalau toh kerja keras [PPATK](#) kalau hasilnya tidak ditindaklanjuti, secara terus terang sangat berat," ujar Adang dalam Rapat Kerja Komisi III [DPR RI](#) dengan [PPATK](#), di Ruang Rapat Komisi III [DPR RI](#), Gedung Nusantara II, Senayan, [Jakarta](#), Selasa (13/9/2022).

Di sisi lain, ia pun mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang sudah digunakan oleh [PPATK](#). Dalam laporan yang diterimanya, anggaran pemanfaatan teknologi [PPATK](#) untuk tahun 2023 sangat besar. Karena itu, penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara [PPATK](#) dengan institusi dalam dan luar negeri sebanyak 30 dokumen, harus berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.

"Penyusunan MoU sebanyak 30 dokumen ini menarik untuk saya, dokumennya apa saja? karena pembiayaan cukup besar. Karena bagaimanapun juga proses dari suatu kerjasama ada proses tindak lanjut. Target apa yang hendak dicapai dalam MoU ini?" tanya politisi Partai Keadilan Sejahtera ([PKS](#)) tersebut.

Sebelumnya dilaporkan bahwa sebanyak 312 rekening judi online telah diblokir oleh [PPATK](#). "Sedangkan total transaksi yang sudah dibekukan oleh [PPATK](#) di tahun 2022 ada 312 rekening, itu isinya Rp836 miliar," kata Ketua [PPATK](#) Ivan Yustiavandana. (rdn/sf)